

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Kemiskinan merupakan salah satu masalah utama yang dihadapi hampir seluruh Negara di dunia, terbukti PBB telah menetapkan Millenium Development Goals (MDGs). Salah satu tujuannya adalah memberantas kemiskinan dan kelaparan, dimana pada tahun 2015 proporsi penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan harus dikurangi hingga 50 persen dari kondisi tahun 1990. Kemiskinan merupakan ketidakmampuan individu dalam memenuhi kebutuhan dasar hidupnya (BPS,2014).

Kemiskinan merupakan masalah sosial yang senantiasa hadir ditengah masyarakat, fenomena sosial yang telah ada dan berkembang sejalan dengan peradaban manusia. kemiskinan merupakan kondisi deprevasi terhadap sumber-sumber pemenuhan kebutuhan dasar yang berupa sandang, pangan, papan, dan pendidikan dasar (Sudibyo,1995). Masyarakat miskin pada umumnya lemah dalam kemampuan berusaha dan terbatas aksesnya pada kegiatan ekonomi sehingga seringkali semakin tertinggal jauh dari masyarakat lain yang memiliki potensi lebih tinggi.

Kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya yang menimbulkan ketimpangan pendapatan, penduduk miskin hanya memiliki sumber daya yang terbatas dengan kualitas yang rendah, selain itu

kemiskinan muncul karena perbedaan kualitas sumber daya manusia, dimana kualitas sumber daya manusia yang rendah maka produktifitas yang dihasilkan juga rendah, kemiskinan muncul karena adanya perbedaan akses modal (Kuncoro, 2000).

Indonesia merupakan salah satu Negara berkembang yang tingkat kemiskinannya cukup tinggi. Ada tiga ciri yang menonjol dari kemiskinan di Indonesia. Pertama, banyak rumah tangga yang berada di sekitar garis kemiskinan nasional, yang setara dengan PPP (*Purchasing Power Parity*) 1,55 dolar AS per hari, sehingga banyak penduduk yang meskipun tergolong tidak miskin tetapi rentan terhadap kemiskinan. Kedua, ukuran kemiskinan didasarkan pada pendapatan, sehingga tidak menggambarkan batas kemiskinan yang sebenarnya. Banyak orang yang mungkin tidak tergolong miskin dari segi pendapatan, dapat dikategorikan sebagai miskin atas dasar kurangnya akses terhadap pelayanan dasar serta rendahnya indikator-indikator pembangunan manusia. Ketiga, mengingat sangat luas dan beragamnya wilayah Indonesia, perbedaan antar daerah merupakan ciri mendasar dari kemiskinan.

Upaya pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan di Indonesia salah satunya adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2014-2019, dimana sasaran utamanya yaitu menurunkan jumlah penduduk miskin serta terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat miskin secara bertahap. Dimana target yang ditetapkan dalam RPJM 2014-2019 yaitu perbaikan distribusi pendapatan dengan perlindungan sosial berbasis keluarga, pemberdayaan

masyarakat dan perluasan kesempatan ekonomi masyarakat yang berpendapatan rendah untuk dapat berkembang guna mendapatkan tingkat kesejahteraan yang layak. Dalam agenda mendukung mengurangi tingkat kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pemerintah telah menerbitkan peraturan presiden Nomor 15 tahun 2010, tentang percepatan penanggulangan kemiskinan.

**Tabel 1.1**  
Presentase Penduduk Miskin Di Indonesia ( Kemiskinan Relative Dan Kemiskinan Absolut) Tahun 2009-2014

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
<b>Kemiskinan Relatif (% dari populasi)</b>	14.2	13.3	12.5	11.7	11.5	11
<b>Kemiskinan Absolut (dalam jutaan)</b>	33	31	30	29	29	28
<b>Koefisien Gini/ Rasio Gini</b>	0.37	0.38	0.41	0.41	0.41	-

Sumber : Badan Pusat Statistik Daerah Istimewa Yogyakarta

Tabel di atas menunjukkan penurunan angka kemiskinan nasional secara perlahan 14,2% pada tahun 2009 mengalami penurunan menjadi 11% pada tahun 2014, sedangkan pada tahun 2013 terjadi kenaikan tingkat kemiskinan sebesar 11,5% penyebabnya adalah kenaikan harga BBM yang mengakibatkan harga kebutuhan pokok naik. Penyebab terjadinya penurunan tingkat kemiskinan di Indonesia dipengaruhi oleh tingkat inflasi, kenaikan upah, penurunan harga komoditas dan kenaikan nilai tukar petani. Tingkat inflasi pada periode 2014 cenderung stabil sebesar 2,31% sedangkan upah buruh naik 4,25 % menjadi Rp

44.125 per hari dan buruh bangunan naik 2,08% menjadi Rp 75.961 per hari, sedangkan harga kebutuhan pokok turun 3-15 %.

Pemerintah Indonesia mendefinisikan garis kemiskinan dengan pendapatan per bulannya (per kapita) sebanyak Rp. 312,328. Jumlah tersebut adalah setara dengan USD \$25 yang dengan demikian berarti standar hidup masih sangat rendah. Namun jika menggunakan nilai garis kemiskinan yang digunakan Bank Dunia, yang mengklasifikasikan persentase penduduk Indonesia yang hidup dengan penghasilan kurang dari USD \$1,25 per hari sebagai mereka yang hidup di bawah garis kemiskinan, maka persentase tabel akan terlihat tidak akurat karena nilainya seperti dinaikkan beberapa persen. Menurut Bank Dunia, angka penduduk Indonesia yang hidup dengan penghasilan kurang dari USD \$2 per hari mencapai angka 50,6% dari jumlah penduduk pada tahun 2009.

**Tabel 1.2**  
Presentase Penduduk Miskin di Pulau Jawa (%)  
Tahun 2008-2014

Provinsi	Tingkat Kemiskinan							rata-rata
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
DKI Jakarta	4.29	3.62	3.48	3.75	2.69	4.51	4.51	3.83
Jawa Barat	13.01	11.96	11.27	10.65	10.09	13.31	10.88	11.59
Jawa Tengah	19.23	17.72	16.56	15.76	15.34	19.77	15.35	17.10
<b>DIY</b>	<b>18.32</b>	<b>17.23</b>	<b>16.83</b>	<b>16.08</b>	<b>16.05</b>	<b>19.9</b>	<b>16.88</b>	<b>17.32</b>
Jawa Timur	18.51	16.68	15.26	14.23	13.4	18.16	15.92	16.02
Banten	8.15	7.64	7.16	6.32	5.85	8.2	7.18	7.21

Sumber : Badan Pusat Statistik, Statistik Indonesia

Di Yogyakarta sendiri termasuk wilayah dengan tingkat kemiskinan yang cukup tinggi bahkan menempati posisi pertama daerah yang tingkat kemiskinannya

tinggi se-Jawa dimana persentase rata-rata penduduk miskin kota dan desa di Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar 17.32% dari data keseluruhan tingkat kemiskinan dari tahun 2008-2014.

Tingginya angka kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta disebabkan karena pertumbuhan sektor perekonomian yang cenderung padat modal dan dikuasai investor tertentu, sehingga tidak sedikit para pelaku usaha kecil yang gulung tikar karena kalah dalam persaingan pasar.

**Tabel 1.3**  
Jumlah Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota  
di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (ribu jiwa)  
Tahun 2010-2014

Kabupaten	Tahun				
	2010	2011	2012	2013	2014
Kulon Progo	90.000	92.800	92.400	86.500	84.670
Bantul	146.900	159.400	158.800	156.600	153.490
Gunung Kidul	148.700	157.100	156.500	152.400	148.390
Sleman	117.000	117.300	116.800	110.800	110.440
Yogyakarta	37.800	37.700	37.600	35.600	35.600
<b>Provinsi DIY</b>	<b>540.400</b>	<b>564.300</b>	<b>562.100</b>	<b>541.900</b>	<b>531.590</b>

Sumber : Badan Pusat Statistik, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Tabel 3 di atas menunjukkan tingkat kemiskinan menurut Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2010-2014 yang menunjukkan bahwa pada tahun 2010 tingkat kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar 540.400 ribu jiwa dimana berfluktuatif mengalami penurunan menjadi 531.590 ribu jiwa pada tahun 2014 sedangkan keparahan tingkat kemiskinan tertinggi terjadi di Daerah Kabupaten Gunung Kidul dimana tingkat kemiskinan

pada tahun 2011 sebesar 157.100 ribu jiwa mengalami penurunan menjadi 148.390 ribu jiwa pada tahun 2014.

Walapun Daerah Kabupaten Gunung Kidul mengalami penurunan kemiskinan akan tetapi Daerah Kabupaten Gunung Kidul menjadi Kabupaten tertinggal di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Hendra (2013), tingginya angka kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta karena dipicu oleh beberapa aspek seperti aspek kehidupan masyarakat yang menyebabkan tingginya kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta adalah ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar, ketiadaan usaha produktif meliputi keterampilan dan daerah yang kurang produktif serta ketiadaan modal

Tingginya tingkat kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta membuat pemerintah memberikan perhatian lebih terhadap upaya pengentasan kemiskinan. Untuk menurunkan tingkat kemiskinan terlebih dahulu perlu diketahui faktor-faktor apa yang mempengaruhi tingkat kemiskinan, sehingga dapat dirumuskan kebijakan yang efektif untuk menurunkan angka kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Faktor-faktor yang diduga mempengaruhi tingkat kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta antara lain (1) PDRB ; (2) Jumlah Penduduk, dan (3) Investasi. Upaya pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta adalah dengan Target Rumah Tangga Sasaran (RTS) dengan

target penekanan angka kemiskinan yaitu berada di level 13,44 hingga 12,78 persen.

Kualitas sumber daya manusia akan berpengaruh terhadap pembangunan ekonomi suatu wilayah. Kuantitas sumber daya manusia dapat dilihat dari jumlah penduduknya. Perkembangan jumlah penduduk bisa menjadi faktor pendorong dan penghambat pembangunan. Faktor pendorong karena, pertama, memungkinkan semakin banyaknya tenaga kerja. Kedua, perluasan pasar, karena luas pasar barang dan jasa ditentukan oleh dua faktor penting, yaitu pendapatan masyarakat dan jumlah penduduk. Sedangkan penduduk disebut faktor penghambat pembangunan karena akan menurunkan produktivitas, dan akan terdapat banyak pengangguran (Sadono Sukirno,1997).

Dalam kaitannya dengan kemiskinan, jumlah penduduk yang besar justru akan memperparah tingkat kemiskinan. Fakta menunjukkan, di kebanyakan Negara dengan jumlah penduduk yang besar tingkat kemiskinannya juga lebih besar jika dibandingkan dengan Negara dengan jumlah penduduk sedikit. Sehingga perlu pengendalian laju perkembangan jumlah penduduk yang dimana jika jumlah penduduk tidak terkendali maka akan menyebabkan masalah seperti tindak kriminalitas, dan tingkat kesehatan yang buruk.

**Tabel 1.4**  
**Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota**  
**Di Daerah Istimewa Yogyakarta (ribu jiwa)**  
**Tahun 2010-2014**

Kabupaten	Tahun				
	2010	2011	2012	2013	2014
Kulon Progo	388.205	390.207	393.221	403.203	405.222
Bantul	911.503	921.263	927.958	947.066	968.632
Gunung Kidul	675.382	677.998	684.740	700.192	698.825
Sleman	1.093.110	1.107.304	1.114.833	1.141.684	1.163.970
Yogyakarta	388.627	390.553	394.012	402.709	400.467
<b>Provinsi DIY</b>	<b>3.457.491</b>	<b>3.487.325</b>	<b>3.514.762</b>	<b>3.594.854</b>	<b>3.671.160</b>

Sumber : Badan Pusat Statistik, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa Jumlah Penduduk di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010-2014 mengalami peningkatan secara berkala. Hal tersebut dapat dilihat pada tahun 2010 yang menunjukkan persentase sebesar 3.457.491 ribu jiwa meningkat pada tahun 2014, sebesar 3.671.160 ribu jiwa.

Kinerja perekonomian dari indikator Produk Domestik Regional Bruto. PDRB adalah nilai bersih barang dan jasa-jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai kegiatan ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode. Semakin tinggi PDRB suatu daerah, maka semakin besar pula potensi sumber penerimaan daerah tersebut. Berikut adalah rincian PDRB Menurut harga konstan di masing-masing Kabupaten di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2010-2014.



**Tabel 1.5**  
 Jumlah PDRB Menurut (Menurut Harga Konstan 2000)  
 Kabupaten/Kota Di Daerah Istimewa Yogyakarta  
 Tahun 2009-2014

<b>Kabupaten</b>	<b>Tahun</b>				
	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Kulon Progo	1.781.227	1.869.338	1.963.028	2.062.182	2.152.377
Bantul	3.967.928	4.177.201	4.400.313	4.645.476	4.884.897
Gunung Kidul	3.330.080	3.474.288	3.642.562	3.825.350	3.999.012
Sleman	6.373.200	6.704.100	7.069.229	7.471.898	7.876.347
Yogyakarta	5.505.942	5.816.568	6.151.679	6.498.900	6.843.306
<b>Provinsi DIY</b>	<b>21.044.042</b>	<b>22.129.707</b>	<b>23.309.218</b>	<b>24.567.476</b>	<b>25.755.939</b>

Sumber : Badan Pusat Statistik, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Pada tabel di atas nilai PDRB atas harga konstan periode tahun 2010-2014 mengalami kenaikan yang signifikan dimana nilai PDRB pada tahun 2010 sebesar 21.044.042 milyar terus mengalami kenaikan pada tahun 2014 sebesar 25.755.939 hal ini berarti membuktikan bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi di Daerah Istimewa Yogyakarta mengalami peningkatan.

Selain dilihat dari penerimaan PDRB pengentasan kemiskinan dapat dilihat dari tingkat investasi yang akan berdampak pada peningkatan tingkat produktifitas industri, yang mendorong tersedianya lapangan pekerjaan sehingga mengurangi pengangguran. Investasi merupakan salah satu faktor penting dalam pertumbuhan ekonomi pada suatu daerah ketika pertumbuhan ekonomi itu meningkat maka

secara otomatis kesejahteraan masyarakat juga akan meningkat hal itu menyebabkan akan berkurangnya angka kemiskinan.

**Tabel 1.6**  
Investasi (PMDN) di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta  
Tahun 2010-2014 (Juta Rupiah)

<b>Kabupaten</b>	<b>Tahun</b>				
	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Kulon Progo	756176.29	34017.51	34017.51	34017.51	378473.81
Bantul	962340.32	189255.75	191257.09	241023.19	253292.29
Gunung Kidul	96951.57	35502.56	35502.56	35502.56	35502.56
Sleman	34017.50	1218958.35	1242033.29	1242243.39	1349718.39
Yogyakarta	35440.18	835409.57	1303134.16	1311867.84	1551559.24
<b>Provinsi DIY</b>	1884925.9	2313143.7	1565153.60	2864654.4	3568546.20

Sumber : Badan Pusat Statistik, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Tabel di atas menunjukkan jumlah investasi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2010 sebesar 1884925.9 milyar berfluktuatif menurunmeningkat pada tahun 2014 menjadi 3568546.20 milyar. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menurun karena tingkat investasi cenderung meningkat sehingga pengangguran berkulang pertumbuhan ekonomi cenderung naik.

Beberapa aspek kehidupan masyarakat yang menyebabkan tingginya kemiskinan di DIY adalah ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar, ketiadaan usaha produktif meliputi keterampilan dan daerah yang kurang produktif serta ketiadaan modal akibat dari lesatan pertumbuhan sektor perekonomian yang cenderung padat modal dan dikuasai investor tertentu. Sektor ekonomi yang

memiliki peranan terbesar dalam perekonomian DIY tahun 2013 adalah hotel, restoran dan perdagangan yang terkait yakni sebesar 20,75%. Sementara sektor yang diharapkan mampu menyerap banyak tenaga kerja seperti industri pengolahan dan pertanian masing-masing hanya 14,45 dan 12,99% (BPS, 2013).

Provinsi Daerah Istimewa merupakan salah satu Provinsi di Indonesia yang memiliki berbagai macam budaya dan sebagai kota pelajar yang memiliki ciri khas tersendiri baik dari kawasan wisata, perdagangan, maupun sumber daya, sehingga berpotensi menghasilkan PDRB yang cukup besar, maupun jumlah penduduk dan tingkat pendidikan tidaklah sama pada masing-masing daerah Kabupaten/ Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, perbedaan kondisi ini ikut menentukan dalam rencana pengembangan daerah.

Dapat diketahui kemiskinan lebih cepat tumbuh di perkotaan dibandingkan dengan pedesaan, pertama, krisis cenderung memberi pengaruh buruk kepada beberapa sektor ekonomi untuk wilayah perkotaan, seperti konstruksi, perdagangan dan perbankan yang membawa dampak negatif terhadap pengangguran di perkotaan, kedua penduduk pedesaan dapat memenuhi tingkat subsistensi dari produk mereka sendiri.

Berdasarkan uraian di atas bahwa PDRB, Jumlah Penduduk dan investasi berhubungan positif terhadap kemiskinan di atas maka penulis bermaksud melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Pengaruh Produk Domestik**

**Regional Bruto (PDRB), Jumlah Penduduk dan Investasi Terhadap Kemiskinan: Studi Kasus Kabupaten/ Kota Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007-2013)”**

**B. Batasan Masalah**

Mengingat luasnya permasalahan serta adanya keterbatasan kemampuan sumber daya peneliti, maka perlu adanya batasan-batasan agar permasalahan yang diberikan lebih terarah dan mudah dimengerti. Adapun pembatasan masalah adalah sebagai berikut:

1. Variabel-variabel yang dianggap berpengaruh terhadap kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta, adalah PDRB, Jumlah Penduduk dan Investasi.
2. Data yang digunakan adalah data tahunan yaitu dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2014 yakni terdiri atas:
  - a. Kemiskinan
  - b. PDRB (Produk Domestik Regional Bruto)
  - c. Jumlah penduduk
  - d. Investasi

**C. Rumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Seberapa besar pengaruh PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) terhadap kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Seberapa besar pengaruh Jumlah Penduduk terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Seberapa besar pengaruh Investasi terhadap kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

#### **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan dilakukanya penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Ingin mengetahui seberapa besar pengaruh PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Ingin mengetahui seberapa besar pengaruh Jumlah Penduduk terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Ingin mengetahui seberapa besar pengaruh Investasi terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Penulis berharap penelitian tentang “Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan Di Yogyakarta” dapat bermanfaat baik bagi penulis sendiri, masyarakat dan para ekonom. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai suatu kajian ilmiah untuk mengetahui pengaruh PDRB, Jumlah Penduduk dan Investasi terhadap tingkat kemiskinan Di Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk menambah informasi dalam dunia perekonomian Indonesia khususnya di bidang ekonomi.
3. Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi para ekonom, mahasiswa dan masyarakat dalam melihat dan mengambil kebijakan perkembangan perekonomian Indonesia kedepannya.